

BAB IV
ALASAN ARAB SAUDI MENDUKUNG KUDETA MESIR
PADAHAL NEGARA LAIN MENGECEM

Arab Saudi merupakan negara yang memiliki pengaruh baik di tingkat regional maupun internasional. Sebagai negara dimana tempat dua kota suci Makkah dan Madinah berada, pemerintah SA memiliki tanggung jawab untuk merepresentasikan wajah Islam ke mata dunia. Itulah sebabnya konstitusi SA berlandaskan Al Quran dan Hadits. Dalam realisasinya, sikap SA dalam hubungannya dengan negara lain tidak selalu selaras dengan konstitusi dan bahkan menimbulkan kontroversi, sebab dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam. Begitulah yang terjadi pada kasus kudeta atas Mursi. Dikatakan tidak sesuai syariat Islam itu karena, misalnya, haram menumpahkan darah orang muslim, sedangkan kudeta di Mesir memakan banyak korban muslim yang tidak bersalah. Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, bukan sebagai penghancur, namun faktanya kudeta di Mesir mengakibatkan banyak kehancuran baik bangunan maupun potensi alam, dan lain-lain.

Tindakan SA di atas dilakukan bukan tanpa alasan. Terdapat tiga hal yang mendorong SA menentukan kebijakan luar negeri dalam mendukung kudeta Mesir. Alasan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konteks Internasional

Dalam konteks internasional, kondisi internasional dianggap sebagai satu kesatuan faktor yang mempengaruhi kegiatan kebijakan luar negeri negara-negara. Konteks internasional juga menjadi pertimbangan bagi negara dalam penanggulangan masalah. Selanjutnya, konteks internasional berbicara tentang posisi hubungan antar negara dalam sistem internasional, serta segala isu-isu yang berkaitan dengan hubungan internasional.

Konteks internasional yang menjadi alasan dukungan SA terhadap kudeta adalah, *pertama*, keamanan. Keamanan memiliki pengertian yang universal, namun keamanan dapat digambarkan sebagai suatu kebebasan dari suatu ancaman, bahaya, resiko kecemasan dan keraguan. Dalam hubungan internasional, keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan *independent identity* dan *fungsional integrity* (M.Saeri, 2014). Menurut Muttiah Alagappa, ada empat elemen yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan konsep-konsep keamanan berkaitan dengan pemikiran tradisional dan kontemporer, yaitu (Kurniawan, 2004) :

- a. Pihak yang perlu mendapatkan jaminan keamanan.

Pemikiran tradisional mengacu pada pandangan realis, dengan menempatkan negara sebagai objek keamanan. Sedangkan pemikiran kontemporer mengacu kepada pandangan idealis yang menekankan keamanan manusia dalam makna yang luas.

b. Nilai-nilai utama dalam masalah keamanan.

Pemikiran tradisional menekankan pada isu-isu kedaulatan negara menyangkut perbatasan wilayah (teritorial) dan perlombaan senjata. Pemikiran kontemporer lebih menekankan isu-isu yang multidimensional seperti dimensi sosial, ekonomi ataupun lingkungan hidup baik langsung ataupun tidak yang dapat mempengaruhi keamanan nasional suatu negara.

c. Bentuk dan sifat ancaman

Pemikiran tradisional melihat ancaman pada konflik antar negara yang berbentuk perang terbuka, yang sifat ancamannya berdimensi militer. Sedangkan pemikiran kontemporer melihat ancaman bisa berbentuk kekerasan seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan

bisa berbentuk non kekerasan seperti masalah kemiskinan dan degradasi lingkungan.

d. Pendekatan-pendekatan keamanan yang digunakan

Pemikiran tradisional lebih menggunakan pendekatan keamanan yang mengarah pada dinamika persenjataan seperti kapabilitas militer secara mandiri, perlombaan senjata, stabilitas pertahanan strategis dan *arm controls* atau *disarmament*. Sedangkan pemikiran kontemporer, mengarah pada *human security* dan kerjasama keamanan baik *common security*, *comprehensive security*, dan *cooperative security*.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa SA mendapatkan ancaman bagi kelangsungan sistem monarkinya. Ancaman tersebut muncul dari pemimpin IM di Mesir. Yakni Mursi. Sesudah rezim diktator Marsekal Hosni Mubarak jatuh akibat revolusi, lahirlah presiden sipil pertama di bawah Muhammad Mursi, para pemimpin negara Teluk seperti Kerajaan Saudi Arabia menghadapi kecemasan yang sangat akibat gelombang revolusi. Negara Teluk khususnya SA berusaha untuk mencegah dan meminimalisir pengaruh revolusi agar tidak memberikan efek kepada pemerintahan dan rakyat.

Alasan lainnya adalah karena SA ingin mengembalikan kembali rezim Husni Mubarak yang mana menjadi sekutu SA. Dengan menjatuhkan Mursi, dan digantikan oleh Presiden sementara Adly Mansur yang pernah menjabat sebagai konsultan selama delapan tahun di SA. Kemudian diganti dengan Presiden tetap Al Sisi yang merupakan kolega Raja Abdullah dan kaki tangan Husni Mubarak, maka akan sangat mudah bagi SA untuk membunuh pengaruh IM, yang selanjutnya menumbuhkan kembali semangat rezim otoriter Husni Mubarak. Artinya, SA tidak menginginkan ideologi demokrasi yang dibawa Mursi mempengaruhi hegemoninya di Timur Tengah. Karena SA ingin tetap memainkan peranan penting di kawasan tersebut. Singkatnya, peran SA ingin mempertahankan Mesir agar tetap aman dan tidak keluar jalur yang diinginkan SA, negara Teluk dan Zionis-Israel, bukan pemerintahan Islam yang akan membahayakan keamanan mereka.

Melihat peristiwa tahun 2011, Mubarak terjungkal dari posisi kekuasaannya melalui revolusi Mesir. Dengan satu tujuan utama untuk menggulingkan rezim otoriter tersebut, semua faksi termasuk IM bersatu melengserkan pengganti Anwar Sadat ini dari kekuasaannya. Revolusi Mesir lantas negara-negara Timur Tengah lainnya untuk membuka pintu revolusi. Mubarak dijebloskan ke penjara dengan banyak alasan. Selain dituding bertanggungjawab atas tewasnya ratusan demonstran pada 2011, dia dianggap

menyalahgunakan kekuasaan. Rezim Mubarak dituduh sarat akan skandal korupsi dan kesewang-wenangan. Namun, saat Mursi menjabat, pengadilan kerap kali gagal menyidangkan Mubarak, sehingga selama dua tahun dia dipenjara dan tidak pernah dimeja-hijaukan (Nuroyono, 2013). Alih-alih dibebaskan pada tanggal 21 Agustus 2013, ternyata di pengadilan Mesir banyak sekutu Mubarak. Pembebasannya didasarkan atas dalih hukum di Mesir mengatur bahwa terdakwa yang tidak divonis pengadilan lebih dari dua tahun, tidak bisa ditahan. Masa penahanan Mubarak sudah mencapai dua tahun, maka menurut Abdellaty, Mubarak boleh tinggal di rumah (Ichsan, 2013). Sehingga, pengadilan menyatakan tidak ada dasar hukum untuk melanjutkan penahanan Mubarak.

Alasan berikutnya adalah karena kolega SA memiliki kepentingan masing-masing terhadap IM dan Mesir. Seperti, UEA, lawan politik Presiden Muhammad Mursi yaitu Marsekal Ahmed Shafik, ia adalah mantan perdana menteri pada era Mubarak yang sekarang menjabat sebagai konsultan untuk Presiden UEA. Ia tidak dapat mengenyampingkan sikap UEA yang sangat anti IM. Sehingga jelas, UEA memiliki kepentingan guna melanggengkan kekuatan status quo yang lama di Mesir. Fakta lainnya, bahwa tokoh-tokoh sisa rezim Mubarak memegang peranan penting dalam gerakan oposisi yang menggulingkan Mursi. Hal ini menjelaskan mengapa jutaan dolar mengalir dari UEA ke oposisi Mesir. Hal ini

juga membuktikan bahwa UEA memiliki hubungan sangat erat dengan orde lama Mesir dan tetap dalam bayangan SA, yang menjadi agen kerjasama internasional yang berfokus pada Mesir.

Selain itu, SA berkolega dengan Zionis-Israel. Menurut Zionis-Israel, Mesir adalah tempat yang strategis untuk melancarkan penjajahannya. Zionis Israel tidak hanya ingin menumbangkan Mursi, tetapi juga kendaraan politik yang mengantarkan Mursi menjadi Presiden, yakni organisasi IM. Bagi Israel, IM harus dicabut hingga akar-akarnya, sebab ideologi IM berkembang di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Gerakan perlawanan Islam Hamas di Gaza diyakini sebagai perpanjangan tangan dari IM. Sehingga, menamatkan IM di Mesir setidaknya dapat melemahkan kekuatan Hamas di Gaza.

Selain itu, Zionis-Israel mempunyai tujuan akhir yang hendak diwujudkan, dan bukan hanya ingin mendirikan Israel Raya, tetapi memiliki tujuan yang lebih luas, diantaranya (Mashadi, Tujuan Akhir Zionisme Mendirikan Kerajaan Daud dan Sulaiman, 2014):

- 1) Gerakan Zionisme mempunyai tujuan akhir mendirikan kerajaan Nabi Dawwud dan Sulaiman, yang menjadi sebuah mitos di kalangan masyarakat Yahudi. Dan

dibangun oleh kalangan Zionis yang sangat aktif secara politik dan ideologi.

- 2) Melakukan penguasaan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam vital guna menunjang gerakan, terutama untuk pembangunan kerajaan Dawwud dan Sulaiman. Sedangkan, kerajaan Dawwud dan Sulaeman hakikatnya sudah berdiri di tanah arab, yang membujur dari sungai nil (Mesir) sampai ke sungai Eufkrat (Iraq). Meskipun wilayah itu masih mempunyai pemerintahan, presiden, raja, tapi semuanya mengabdikan kepada Zionis-Israel.
- 3) Menanamkan doktrin zionisme kepada seluruh orang-orang yahudi di seluruh dunia, tentang doktrin tanah yang dijanjikan yakni Palestina. Dan menjadi hak mutlak bagi mereka. Karena itu, tidak ada entitas lainnya yang mempunyai hak hidup di wilayah itu.
- 4) Karakter hubungan saling berkaitan antara politik dan ekonomi sudah menjadi ideologi zionisme dan sangat mempengaruhi dalam setiap langkah yang mereka lakukan. Karena itu, setiap gerakan zionisme berusaha melakukan penguasaan terhadap setiap pemerintahan di dunia dan menguasai mereka.

5) Menciptakan langkah-langkah strategis yang tujuannya melemahkan bangsa Arab dan Islam dalam menghadapi Zionis-Israel dengan menggunakan politik adu domba (divide et impera), dan menanamkan sekulerisme yang menghilangkan fanatisme terhadap agama (Islam). Dan mendorong agar paham pluralisme tersebut menjadi ideologi. Dengan cara itulah gerakan-gerakan yang menentang Zionisme akan menjadi lemah. Karena masyarakat muslim sudah tidak lagi memiliki keyakinan terhadap agama mereka.

B. Situasi Ekonomi dan Militer Arab Saudi

Kemampuan ekonomi militer negara sangat mempengaruhi hasil pembuatan keputusan luar negerinya (**Jatmika, 2000**). Kondisi ekonomi negara juga dapat menjadi gambaran kondisi politik negara. Artinya, posisi internasional suatu negara sangat dipengaruhi oleh politik internal dan kondisi ekonomi. Dalam hal ini, Coplin melihat kebijakan luar negeri negara tidak terlepas dari ekonomi dan militernya.

Pada tahun 1932, yakni setelah berdirinya kerajaan SA modern, perekonomian masyarakat SA bergantung pada pertanian, terutama ekspor kurma. Namun pada tahun 1938,

perekonomian SA mengalami perubahan pasca ditemukannya sumber minyak dan proses komersialisasinya. Sampai pada sekarang, ekonomi pasar bebas SA telah mengalami perubahan yang luar biasa dalam waktu yang relatif singkat. Dibuktikan dengan SA merupakan produsen dan eksportir minyak terbesar di dunia (Zulifan, Mengenal Arab Saudi, Negeri Para Nabi, 2015).

Selama pemerintahan Raja Abdullah, ia menggunakan kekayaan minyak untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memangkas pengangguran. Abdullah juga menggelontorkan dana hingga 130 miliar dolar AS untuk meningkatkan perekonomian guna mengantisipasi pemberontakan yang mengguncang negara-negara Timur Tengah. Di bawah pemerintahan Abdullah, PDB Arab Saudi tumbuh cukup pesat. Berdasarkan IMF pada 1996, Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini sebesar 163 miliar dollar AS (Jatmiko, 2015). Di bawah Raja Abdullah juga produksi minyak SA mengalami kenaikan sebesar 30 persen. Pada tahun 2013, PDB Arab Saudi sebesar \$748.4 miliar (Economis, 2013). Dalam laju ekspor minyak SA, Cina merupakan negara yang menduduki peringkat paling tinggi sebagai penerima ekspor minyak SA. Berikut grafik PDB SA dalam enam tahun terakhir:



Grafik 4.1

Sumber : <http://id.tradingeconomics.com/saudi-arabia/gdp>

Selanjutnya, Arab Saudi mewakili lebih dari 20% (seperempat dari PDB dunia Arab, menurut data IMF terbaru) dari gabungan PDB gabungan dari Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Pasar saham Arab mewakili lebih dari 50% dari seluruh kapitalisasi pasar saham dari kawasan MENA (Council, 2013). Dan pasar SA terdaftar membuat lima dari sepuluh perusahaan di wilayah tersebut. Saudi ARAMCO dan SABIC menjadi dua perusahaan konglomerat SA. Badan Moneter Saudi Arabia (SAMA) dan bank sentral kerajaan adalah pemegang cadangan devisa terbesar ketiga di dunia. Selanjutnya, Saudi Aramco, perusahaan minyak nasional kerajaan adalah produsen terbesar di dunia dengan produksi berkelanjutan sekitar 12.5 juta

barel per hari. Dan memiliki cadangan terbesar di dunia, saat ini diperkirakan 2.5 juta barel per hari atau sekitar 70% dari kapasitas global yang tidak terpakai (Council, 2013).

Dalam kaitannya dengan dukungan meteril SA terhadap kudeta, dapat dikatakan bahwa SA mampu untuk pendanaan pra dan pasca kudeta. Dana sebesar \$5 miliar yang dihibahkan SA kepada pemerintah Mesir pasca kudeta, atau dengan kata lain 3.06% dari PDB SA yang sebesar \$163 miliar, terbilang nominal kecil untuk menjatuhkan dominasi IM di Timur Tengah. Sehingga, sangatlah memungkinkan bagi SA untuk menghibahkannya.

Pada periode kepemimpinan Raja Abdullah, SA mampu mempertahankan stabilitas keamanan, meskipun negara-negara di kawasan Timur Tengah tengah dilanda *Arab Spring*. Didukung oleh kondisi militer SA yang mumpuni, dari 10 daftar negara Islam terkuat di dunia tahun 2013, SA menempati posisi ke enam setelah Indonesia. Keterangan detail armada perang SA; Tentara: 258.500, Pesawat: 1200, Helikopter: 314, Kapal Angkatan Laut: 77, Anggaran Pertahanan: 39,2 miliar dollar AS dan Daya Beli: 622 miliar dollar AS (Asrol, 2013).

Sejumlah negara di Timur Tengah meningkatkan anggaran militer mereka pada 2013 dengan menghabiskan dana triliunan rupiah. Menurut *Stockholm International Peace*

Research Institute (SIPRI), Arab Saudi memiliki anggaran tertinggi, bahkan menduduki posisi keempat di dunia (Choirul, Anggaran Militer Arab Saudi Rp 766 Triliun, 2014). Artinya, anggaran militer SA lebih tinggi daripada Inggris, Jepang dan Prancis. Secara militer SA sangat mumpuni, ditambah dengan besarnya anggaran militernya yang besar, sehingga dapat kapan saja menambah persenjataan maupun perlengkapan militer lainnya.

CIA membutuhkan waktu hampir 60 tahun untuk berperan dalam kudeta menggulingkan Perdana Menteri Iran Muhammad Mussadegh pada tanggal 19 Agustus 1953 (Hearst, 2013). Tapi dukungan SA terhadap kudeta Mesir yang dikepalai Pangeran Bandar bin Sultan dilancarkan dengan seketika. Intervensi SA terhadap kudeta belum pernah lagi ada sejak perang Yom Kippur 1973 dengan Israel. Ketika Adly Mansour, mantan Kepala Mahkamah Agung Mesir, dilantik sebagai Presiden interim, Raja Abdullah memuji tentara Mesir seketika pula setelah pelantikan.

Dibalik dukungan SA terhadap kudeta, SA menanggung resiko baik secara ekonomi maupun militer. Dengan nominal dukungan seperti tertera di atas, SA harus menaikkan harga minyaknya, sehingga stabilitas perekonomian yang bersumber dari minyak tetap terjaga. Fakta lain adalah sekitar 2 juta orang

Mesir bekerja sebagai pekerja tamu di SA (Hearst, 2013), jika SA kehilangan pekerja-pekerja tersebut sebagai dampak kebencian rakyat Mesir terhadap SA yang telah membantu pertumpahan darah di Mesir, maka SA kehilangan sumber daya manusia dari pekerjanya.

Berbeda dengan konsekuensi secara militer, jika SA tidak mendukung kudeta, maka kredibilitas militernya sebagai negara 'center' di Timur Tengah menurun. Sebab, SA tidak mampu mempertahankan sistem monarkinya dengan cara militer. Namun dampaknya, SA bisa saja diserang balik oleh IM di negara-negara Timur Tengah lainnya, sebab dianggap penghambat penyebaran nilai-nilai IM, khususnya di Timur Tengah.

C. Kondisi Politik dalam Negeri Arab Saudi

Kondisi politik dalam negeri merupakan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan baik dalam negeri itu sendiri maupun dalam hubungannya dengan negara lain. Hal ini jelas bahwa politik domestik dapat dipahami sebagai dinamika politik internal negara atau hanya sebagai sistem politik yang diadopsi. Kondisi politik domestik juga termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik masyarakatnya.

Sistem pemerintahan Arab Saudi adalah monarki berdasarkan Islam. Pemimpin pemerintahannya adalah Raja yang sekaligus panglima militer tertinggi. Raja dibantu oleh 22 Dewan Menteri/Kabinet. Raja juga disarankan oleh Badan Legislatif/Dewan Konsultasi (Majlis Asy Syura). Jalannya pemerintahan didasarkan pada syari'ah (hukum Islam) yang menjiwai sifat negara, tujuan dan tanggungjawabnya, serta hubungan antara penguasa dan warga. Karena SA merupakan negara Islam, maka sistem peradilannya pun sesuai syari'ah (hukum Islam).

Berangkat dari kondisi pemerintahan SA yang monarki, kondisi tersebut bertentangan dengan ideologi atau sistem demokrasi IM yang direpresentasikan oleh Mursi. Belajar dari revolusi *Arab Spring* yang menjatuhkan lima pemimpin negara yang otoriter, yakni Zine El Abidine Ben Ali (Tunisia), Hosni Mubarak (Mesir), Muammar Khadafi (Libya), Ali Abdullah Saleh (Yaman) dan Ahmad Al Audah (Suriah). Dan fakta bahwa pengaruh IM semakin meluas di Timur Tengah dan juga dunia. SA semakin merasa terancam. Sistem monarki yang masih dipertahankan oleh SA terancam oleh merebaknya pengaruh demokrasi sebagai dampak dari *Arab Spring*.

Konstelasi politik Arab mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan peta politik itu terutama disebabkan

oleh perang *proxy* yang ikut mempengaruhi kondisi mutakhir di Mesir dan Suriah. Dua negara yang dapat dijadikan referensi dalam memetakan politik di Timur Tengah. Arus seperti ini, tidak dapat dibendung oleh SA yang *notabene* kehilangan identitas politiknya. Maksudnya, sikap SA yang seringkali berafiliasi dengan negara non muslim/AS mengakibatkan kehilangan kredibilitasnya di mata negara-negara Timur Tengah.